



Politics of Islamic Education During the Old Order

Faisal Caniago^{1*}, Sehat Sultoni Dalimunthe²

Program Pasca Sarjana

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Corresponding Author: Faisal Caniago caniagofaisal0712@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Politics of Islamic Education, New Order Period

Received : 5 June

Revised : 21 June

Accepted: 22 July

©2023 Caniago, Dalimunthe: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This paper explains how the politics of Islamic education occurred during the Old Order. Presented how the development of Islamic education in Indonesia. Government policies specifically in the implementation of Islamic education tend to change from time to time, both related to a number of religious education policies in schools, religious education policies in madrasas, and also in Islamic tertiary institutions

Politik Pendidikan Islam Masa Orde Lama

Faisal Caniago^{1*}, Sehat Sultoni Dalimunthe²

Program Pasca Sarjana

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Corresponding Author: Faisal Caniago caniagofaisal0712@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Politik Pendidikan Islam, Masa Orde Baru

Received : 5 June

Revised : 21 June

Accepted: 22 July

©2023 Caniago, Dalimunthe: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Tulisan ini menjelaskan tentang bagaimana politik pendidikan Islam yang terjadi pada masa orde lama. Disajikan bagaimana perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Kebijakan pemerintah terkhusus di penyelenggaraan pendidikan Islam cenderung mengalami perubahan dari masa ke masa, baik itu terkait sejumlah kebijakan pendidikan agama di sekolah, kebijakan pendidikan agama di madrasah, dan juga di perguruan tinggi Islam

PENDAHULUAN

Berbicara tentang pendidikan Islam di Indonesia, sangatlah erat hubungannya dengan kedatangan Islam itu sendiri ke Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia berjalan menurut rentak gerakan Islam pada umumnya dalam politik ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Pada permulaan abad ke-20 terjadi beberapa perubahan dalam Islam di Indonesia yang di dalam garis besarnya dapat digambarkan sebagai kebangkitan, pembaharuan, bahkan pencerahan atau renaissance. Perubahan yang berlaku dalam pendidikan Islam semenjak saat itu hanya dapat dipahami kalau kita melihat keterikatan antara berbagai aspek pembaharuan baik itu politik, ekonomi sosial, maupun budaya. Wujud pendidikan Islam di Indonesia adalah suatu kenyataan yang sudah berlangsung sangat panjang dan sudah memasyarakat.

Pada masa penjajahan Belanda dan pendudukan jepang, pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat sendiri dengan mendirikan pesantren, sekolah, dan tempat-tempat latihan lainnya. Setelah merdeka, pendidikan Islam dengan ciri khasnya madrasah dan pesantren mulai mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah Republik Indonesia. Menurut Mahmud Yunus bahwa sejarah pendidikan di Indonesia sama tuanya dengan masuknya Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pemeluk agama baru tersebut sudah barang tentu ingin mempelajari dan mengetahui lebih mendalam tentang ajaran-ajaran Islam. Ingin pandai sholat, berdo'a, dan membaca Al-qur'an yang menyebabkan timbulnya proses belajar meskipun dalam pengertian yang amat sederhana. Dari sinilah mulai timbul pendidikan Islam dimana pada mulanya mereka belajar di rumah-rumah, mesjid, dan kemudian menjadi pondok pesantren. Berangkat dari gambaran umum di atas tentang kedatangan Islam di Indonesia menjadi sangat penting untuk dikaji terutama yang berkaitan dengan kedudukan pendidikan Islam dalam konteks sejarah pendidikan nasional khususnya pada masa pemerintahan orde lama (ORLA). Hal ini penting untuk diuraikan dan di analisis, guna memahami langkah reformatif pengembangan pendidikan Indonesia pada masa awal kemerdekaan Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Islam pada masa Orde Lama

Pendidikan Islam di Indonesia didasarkan dengan awal mula masuknya Islam ke nusantara. Kedatangan Islam ke Indonesia dilakukan secara damai. Berbeda dengan penyebaran Islam di Timur Tengah yang dalam beberapa kasus disertai dengan pendudukan wilayah oleh militer muslim. Islam dalam batas tertentu disebarkan oleh pedagang, kemudian dilanjutkan oleh para guru agama dan pengembara sufi. Sistem pendidikan Islam yang digunakan adalah sistem pendidikan non formal dan formal. Pendidikan formal dilaksanakan di langgar, masjid, dan pesantren, sedangkan untuk pendidikan formal dilaksanakan di madrasah, sekolah dinas dan perguruan tinggi.

Sistem pendidikan Islam mulai mengalami perubahan sejalan dengan perubahan zaman dan pergeseran kekuasaan di Indonesia. Kejayaan Islam yang mengalami kemunduran sejak jatuhnya Andalusia kini mulai bangkit dengan gerakan pembaharuan Islam, disamping itu pemerintahan Belanda mulai

mengenalkan sistem pendidikan formal yang lebih sistematis dan teratur untuk menarik kaum muslimin masuk pada pendidikan formal. Hal ini karena sistem pendidikan Islam di masjid surau atau langgar sudah dipandang tidak memadai lagi dan perlu adanya pembaharuan dan disempurnakan.

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada zaman Orde Lama tidak lepas dari peran organisasi Islam yang bergerak dalam bidang pendidikan, lembaga pendidikan Islam dan para tokoh pendidikan Islam. Selanjutnya, perkembangan pendidikan Islam di Indonesia ditentukan oleh sekolah-sekolah swasta yang secara konsisten mengadakan pendidikan Islam seperti halnya madrasah.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Metode kepustakaan merupakan metode yang mengumpulkan beberapa sumber yang dapat mendukung penelitian ini seperti buku, artikel, jurnal, informasi, dan lainnya.

PEMBAHASAN

Pemerintahan Indonesia dimulai sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan merupakan tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebagai sebuah negara yang independen, maka bangsa Indonesia kemudian menyusun sistem kehidupan berbangsa dan bernegaranya berdasar Pancasila dan UUD 1945. Di antara sistem kehidupan tersebut tersusunlah sistem pendidikan yang diinginkan oleh bangsa Indonesia bagi seluruh rakyatnya. Dalam rangka implementasi dasar negara UUD 1945, maka pemerintah Indonesia di masa itu yang kemudian di kenal dengan pemerintahan orde lama di bawah kepemimpinan Ir. Soekarno menyusun berbagai peraturan sebagai kebijakan pemerintah bagi pendidikan nasional ketika itu. Tak lepas pula dari kebijakan saat itu adalah pendidikan Islam. Ketika awal kemerdekaan Indonesia pendidikan Islam masih sangat sederhana, pendidikan Islam masih didominasi oleh sistem pendidikan pesantren dan madrasah. Sekolah-sekolah Islam masih sedikit jumlahnya. Untuk memahami politik pendidikan Islam pada masa orde lama, maka perlu dijelaskan bahwa produk kebijakan pemerintah orde lama yang merupakan implementasi dari pasal 31 UUD 1945 sebagai dasar negara, dapat dirinci bentuk kebijakan tersebut sebagai berikut :

1. Keputusan badan pekerja komite nasional indonesia pusat (BPKNIP) pada tanggal 27 Desember 1945
2. Keputusan bersama antara menteri PPK dan menteri agama No.1142/Bhg A(pengajaran), Jakarta tanggal 2 Desember 1946, No 1285 /K.J (Agama)Yogyakarta tanggal 2 Desember 1946
3. UU No 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengadjaran di Sekolah
4. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 1432/Kab. Tanggal 20 Juni 1951 dan Menteri Agama No. K.1/652, tanggal 20 Juni 1951

5. Instruksi Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 17678/Kab dan Menteri Agama No. K.1/9180 tanggal 16 juli 1951. 6. Undang - undang No. 12 Tahun 1954 7. TAP MPRS No 2 Tahun 1960

Secara singkat kebijakan pendidikan dapat dipahami dari pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Di antaranya menurut Munadi dan Barnawi, bahwa kebijakan pendidikan merupakan keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan aktor (kebijakan) di luar pemerintah dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi seluruh warga masyarakat.³ Pengertian ini merujuk pada rumusan bahwa kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan.

Lebih jelas dikatakan bahwa kebijakan publik memiliki ciri umum yaitu; *pertama* kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh negara. *Kedua* kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, dan bukan mengatur kehidupan orang seorang atau golongan. *Ketiga* dikatakan sebagai kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh oleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna langsungnya, atau disebut dengan *eksternalitas*. Ketika persoalan pendidikan merupakan persoalan bagi khalayak masyarakat umum, maka seluruh kebijakan di bidang pendidikan akan menjadi ranah publik.

Seirama dengan perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945 hingga sekarang, maka sejarah kebijakan pendidikan di Indonesia termasuk di dalamnya pendidikan Islam memang tidak bisa lepas dari kurung waktu tertentu, yang ditandai dengan pengingat. Oleh karena itulah perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia sejak Indonesia merdeka sampai tahun 1965 yang lebih dikenal dengan masa orde lama (ORLA), yang berbeda dengan tahun 1965 sampai sekarang yang lebih dikenal dengan orde baru (ORBA). Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebagaimana dikemukakan terdahulu perubahan-perubahan diberbagai aspek juga dalam pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan merupakan perubahan yang bersifat yang mendasar, yaitu dengan dasar dan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka. Untuk mengadakan penyesuaian cita-cita tersebut, maka bidang pendidikan mengalami perubahan terutama dalam landasan tujuan pendidikan, sistem persekolahan, dan kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Tindakan pertama yang diambil oleh pemerintah Indonesia ialah menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan dan aspirasi rakyat, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 yang berbunyi: Pertama, Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Kedua, Pemerintah mengusahakan suatu system pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.¹⁰ Oleh karena itu pembatasan pemberian pendidikan disebabkan perbedaan agama, sosial, ekonomi, dan golongan yang ada di masyarakat tidak dikenal lagi. Dengan demikian setiap anak Indonesia dapat memilih kemana dia akan belajar sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Pada periode orde lama ini, berbagai peristiwa dialami oleh bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan, yaitu:

1. Dari tahun 1945-1950 landasan pendidikan adalah UUD 1945 dan falsafah pancasila.
2. Pada permulaan tahun 1949 dengan terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat (RIS), di negara bagian timur dianut suatu system pendidikan yang diwarisi dari zaman pemerintahan Belanda.
3. Pada tanggal 17 agustus 1950, dengan terbentuknya kembali negara kesatuan Republik Indonesia, ladasan idil pendidikan UUDS RI.
4. Pada tahun 1959 presiden mendekritkan RI kembali ke UUD 1945 dan dan menetapkan manifesto politik RI menjadi haluan Negara. Dibidang pendidikan ditetapkan Sapta Usaha Tama dan Panca Wardhana.
5. Pada tahun 1965 sesudah peristiwa G 30 S/PKI kita kembali lagimelaksanakan pancasila dan UUD secara murni dan konsekuen.

A. Sejarah Penghapusan Tujuh Kata dalam Piagam Jakarta

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia lahir dan hadir untuk Indonesia sebagai falsafah kebangsaan atau kenegaraan. Pancasila dibentuk dengan dasar pemikiran mendalam dan atas beberapa pertimbangan unuk kesatuan bangsa Indonesia. Proses perumusan Pancasila bukan proses yang dapat dinilai instan, melainkan suatu proses perenungan mendalam dari para *founding father's*. 13 Pancasila yang ada saat ini, tidak lepas dari ilham Piagam Jakarta yang menjadi konsesus antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Ketika Piagam Jakarta sudah disetujui oleh BPUPKI pada saat itu, ternyata perubahan masih dapat terjadi. Pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan jiwa toleransi yang besar golongan Islam menerima penghapusan kata-kata "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" di dalam Piagam Jakarta dengan tujuan mempertahankan keutuhan NKRI dari serangan pihak luar. Maka tidak benar, orang yang menyatakan bahwa Islam itu radikal dan intoleran. Sikap kelompok Islam yang menerima penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta justru menjadi bukti yang sangat nyata. Penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta ditunjukkan untuk mencegah pemisahan masyarakat Indonesia Timur yang tidak sejutu dengan kata-kata tersebut. Dan kelompok Islam pada saat itu menerimanya sebagai bentuk toleransi yang besar.

B. Berdirinya Kementrian Agama Tahun 1946

Pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia telah diadakan Kantor Urusan Agama, melanjutkan kantor Adviseur voor Inlandsche zaken peninggalan Belanda. Kantor ini memiliki dua fungsi: pertama, memberikan pertimbangan dalam hal keIslaman dan, kedua: menjalankan penyelidikan dan pengawasan atas kegiatan-kegiatan politik Islam. Jepang bermaksud untuk memakai dasar yang dua tadi untuk kantor agama. Akan tetapi maksud itu tidak dapat dijalankan, karena politik dikalangan umat Islam menuju perkembangan.¹⁴ Dalam rapat besar (sidang) BPUPKI, tanggal 11 Juli 1945 Mr. Muhammad Yamin mengusulkan perlunya dibentuk kementrian yang istimewa, yang berkuhungan dengan keagamaan yaitu kementrian Islamiyah yang menurutnya akan memberikan jaminan kepada umat Islam. Tetapi usulan tersebut tidak begitu mendapat dukungan.

Keputusan untuk tidak membentuk kementerian Agama dalam cabinet Indonesia yang pertama, menurut BJ. Boland, membuat rasa kekecewaan dikalangan umat Islam terlebih dengan keputusan sebelumnya yang berkenaan dengan dasar Negara, yaitu Pancasila, dan bukannya Islam atau Piagam Jakarta. Usulan pembentukan kementerian Agama pertama kali diajukan kepada BPKPNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusta) pada tanggal 11 Nopember 1946 oleh anggota KNIP dari keresidenan Banyumas. Usulan ini mendapatkan dukungan dari anggota KNIP untuk kemudian memperoleh persetujuan BPKNPI. Wakil-wakil KNIP Daerah Banyumas mengusulkan setelah kemerdekaan Indonesia ini hendaknya urusan agama tidak disambal lalukan dalam tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ataupun kementerian-kementerian lainnya, akan tetapi diurus satu kementerian, yaitu kementerian Agama. Usulan ini mendapat sambutan dan dikuatkan oleh tokoh-tokoh Islam yang hadir dalam sidang KNIP pada waktu itu. Presiden Soekarno memberi isyarat kepada wakil presiden Mohamad Hatta bahwa kementerian agama mendapat perhatian pemerintah. Pada 3 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan ketetapan No.1/S.D yang antara lain berbunyi: Presiden Republik Indonesia, Mengingat: Usul Perdana Mentri dan BPKNIP, memutuskan Mengadakan Kementerian Departemen Agama. Pengumuman berdirinya Kementerian Agama ini disiarkan melalui siaran Radio Republik Indonesia. Haji Mohammad Rasjidi menjadi Mentri Agama pertama RI, seorang ulama berlatar belakang pendidikan Islam modern dan dikenal juga sebagai tokoh Muhammadiyah

C. Implikasi Teknis dari Kebijakan Pemerintah Orde Lama terhadap Pendidikan Islam

Beberapa kebijakan Pemerintah Orde Lama dalam bidang pendidikan dan Agama berdampak terhadap pendidikan Islam, baik dalam konteks kelembagaan maupun materi dan kurikulumnya. Di antara implikasi tersebut adalah:

1. Madrasah Semenjak 3 Januari 1946 Departemen Agama resmi berdiri dan menjadi bagian kabinet Republik Indonesia, maka lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Orientasi usaha Departemen Agama dalam bidang pendidikan Islam bertumpu pada aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah, di samping pada pengembangan madrasah itu sendiri.¹⁸ Bersamaan dengan itu eksistensi madrasah sebagai bagian dari lembaga pendidikan formal semakin diperhatikan oleh pemerintah
2. Madrasah Wajib Belajar Madrasah Wajib Belajar (MWB) merupakan lembaga madrasah yang mulai berkiprah pada tahun pelajaran 1958/1959elain dari untuk melakukan revolusi perubahan pendidikan di lembaga pendidikan Islam - madrasah dan pesantren - MWB memiliki tujuan dan fungsi antara lain : 1) Implementasi amanat Undang-undang Kewajiban Belajar, 2) Pendidikan terutama sekali diarahkan kepada pembangunan jiwa bangsa untuk mencapai kemajuan di lapangan ekonomi, industrialisasi dan transmigrasi. Sedangkan lama

belajar di MWB ini adalah 8 tahun. Adapun pelajaran yang diberikan di MWB dapat digolongkan ke dalam 3 golongan besar yaitu :

- 1) Pelajaran agama,
 - 2) Pelajaran pengetahuan umum, dan
 - 3) Pelajaran dan kerajinan tangan.
3. Sekolah Guru Agama Islam Melihat posisi mata pelajaran agama yang demikian penting dan menjadi bagian perjuangan kaum muslim dari periode awal kemerdekaan sampai periode kontemporer merupakan latar belakang bagi munculnya inisiatif guru agama Islam modern.²³ Sekolah Guru mulai dibuka pada 16 Mei 1948 dengan pendirian Sekolah Guru dan Hakim Islam (SGHI) di Solo. Namun pelaksanaannya tidak dilanjutkan karena terganggu oleh aksi militer Belanda II. Baru setelah Belanda menyerahkan kedaulatan sepenuhnya pada 1949, upaya-upaya pembinaan dan
 4. Perguruan Tinggi Agama Islam Menyangkut politik pendidikan Islam dalam bidang pendidikan tinggi dapat ditelusuri bahwa pendirian perguruan tinggi Islam pertama, menurut Mahmud Yunus, berdiri pada 9 Desember 1940 oleh Mahmud Yunus, Islamic College, di Padang Sumatera Barat. Lembaga ini terdiri dari dua fakultas, yaitu fakultas syariat/agama dan fakultas pendidikan bahasa Arab.
 5. Kurikulum PAI Kebijakan pemerintah orde lama dengan produknya tentang pendidikan semisal UU No 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran belum menyebut secara eksplisit adanya istilah kurikulum. Aplikasi kurikulum saat itu identik dengan materi pelajaran yang diberikan oleh guru kepada murid. Akibatnya, terjadi variasi materi pelajaran yang disampaikan oleh satu guru dengan guru lain, dan antara satu sekolah dengan sekolah lain.³⁰ Tetapi rangkaian kurikulum yang selalu menyentuh tujuan, isi, metode, dan penilaian dalam sebuah pendidikan akan dapat kita temui dalam UUPP 4/50. Diantaranya dalam UU ini menyebutkan bahwa " Tujuan pendidikan dan pengadjaran ialah membentuk manusia susila jang tjakap dan. warga negara jang demokratis serta bertanggung djawab tentang kesedjahteraanmasjaraikat dan tanah air ".

Dengan mencantumkan tujuan pendidikan menunjukkan keinginan bangsa Indonesia ketika akan hasil dari sebuah pendidikan. Selanjutnya undang-undang tersebut merinci tujuan institusional pendidikan untuk memudahkan pencapaian tujuan pendidikan nasional sebagaimana pasal sebelumnya. Kebijakan pemerintah orde lama dalam hal penetapan pendidikan Agama (Islam) dalam struktur kurikulum hingga lahirnya kurikulum tahun 1964, yang disebut dengan Rencana Pendidikan, belum terlihat secara tegas, karena pada kurikulum itu pelajaran agama masih merupakan sub/bagian dari wardhana (bidang studi) perkembangan moral dan diintegrasikan antara mata pelajaran sejarah, ilmu bumi dan kewarganegaraan.

Artinya memang ketika masa orde lama belum ditemukan adanya kebijakan pendidikan bidang kurikulum yang menunjukkan adanya pemberlakuan secara khusus pendidikan agama Islam sebagai salah satu dari mata pelajaran. Tetapi walaupun demikian, pembelajaran agama Islam telah berlangsung di tengah-tengah masyarakat muslim. Pondok pesantren dan madrasah (diniyah) telah memiliki dan melaksanakan pembelajaran agama Islam, sehingga dapat dipahami bahwa walaupun belum menjadi kebijakan pemerintah pendidikan Islam sudah dapat dirasakan oleh masyarakat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Ada banyak dinamika yang terjadi pada pendidikan Islam pada masa orde lama. Mengupayakan pendidikan Islam dapat terselenggara di lembaga-lembaga pendidikan agama seperti pondok pesantren, madrasah, dan lainnya. Selain itu pemerintah juga mengusahakan pendidikan Islam juga masuk pada sekolah-sekolah umum serta membenahi fasilitas demi mendukung pelaksanaan pendidikan Islam.

PENELITIAN LANJUTAN

Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan teori yang sama dengan periode masa reformasi dan masa kini sehingga didapatkan bagaimana perkembangan pendidikan islam di setiap periodenya dan diketahui bagaimana perbedaan di tiap masanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terlanjaknya penelitian ini dan dimuat dalam jurnal maka saya selaku Peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Sehat Sultoni Dalimunthe, M.A selaku dosen pembimbing dalam membuat hasil karya tulisan ini;
2. Sudara Faisal Caniago.

DAFTAR PUSTAKA

- A.R. Tilaar Dan Riant Nugroho. Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Adn Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Assegaf, Abd. Rachman. Politik Pendidikan Nasional Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra Proklamasi Reformasi. Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005.
- Djaelani, Timur. Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Bangunan Perguruan Agama. Jakarta: Dermaga, 1980.
- Djumhur Dan Drs. H.Danasaputra. Sejarah Pendidikan. Bandung: CV. Ilmu, 1976.
- Evi Fatimatur Rusydiyah, "ANALISIS HISTORIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI MASA KH.A.WAHID HASYIM," T.T., 13.

- H. Maksum. *Madrasah: Sejarah Dan Perkembangannya*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999. Hj. Enung K. Rukiati Dan Dra. Fenti Hikmawati, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*. Bandung : Pustaka Setia, 2006.
- Hm. Nasruddin Ch, *Berkontribusi Kekuasaan , Konsolidasi Kebangsaan*, Lkis, Yogyakarta, 2008.
- Idris, Zahara. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Bandung: Angkasa, 1981.
- Langgulung, Hasan. *Pendidikan Islam Dalam Abad Ke 21*. Jakarta: PT. Al-Husna Zikra, 2001.
- Mahfud, Choirul. *Politik Pendidikan Islam Di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Orde Baru)*. Surabaya: Disertasi IAIN Sunan Ampel, 2013.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Saidi, Ridwan. *Pemuda Islam Dalam Dinamika Politik Bangsa 1925-1984*. Jakarta: CV Rajawali, 1984.
- Subhan, Arief. *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi Dan Identitas*. Jakarta : Kencana, 2012.
- Sudardja, Endang. *UUD RI 1945 Dalam Hubungannya Dengan PendidikanMoral Pancasila*. Bandung: Ghalia Indonesia, 1984.
- Sudirman, *Lintasa Sejarah Agama-Agama di Indonesia*. Kemenag, 2015.
- Yunus, Mahmud *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1985.